

MAKALAH UJIAN TENGAH SEMESTER

“KONSEP DAN TEORI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs)”

(Disusun untuk Memenuhi Ujian Tengah Semester Mata Kuliah Analisis Dampak Pembangunan)

Dosen Pengampu: Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D



Disusun oleh:

Kelompok 8

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. Adelia Chairunnisa Pane | 2116041090 |
| 2. Anggi Anggraini | 2116041033 |
| 3. Anisa Soleha | 2116041026 |
| 4. Elsa Apriyana | 2156041031 |
| 5. Nike Yuliana | 2116041037 |
| 6. Vania Damayanti | 2116041003 |

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2024

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini hingga selesai. Makalah ini kami susun secara bersama-sama untuk memenuhi Ujian Tengah Semester pada Mata Kuliah Analisis Dampak Pembangunan dengan judul “Konsep dan Teori Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)”.

Tidak lupa kami mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dan berkontribusi dengan memberikan materi maupun pikirannya. Dan harapan kami semoga makalah ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini di kemudian hari. Akhir kata kami memohon maaf atas segala kekurangan dalam penyusunan makalah ini.

Bandar Lampung, 02 April 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penulisan	2
BAB II PEMBAHASAN.....	
2.1 Konsep dan Teori Pembangunan Berkelanjutan	3
2.2 Prinsip dan Tujuan SDGs.....	4
2.3 Tantangan dan Peluang Penerapan SDGs di Indonesia	6
2.4 Implementasi SDGs di Indonesia	8
BAB III PENUTUP	
3.1 Kesimpulan	10
DAFTAR PUSTAKA	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan tantangan serius yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Meskipun kemajuan teknologi dan industri telah mengubah lanskap global, namun masalah kemiskinan tetap menjadi ancaman bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi. Dalam rangka mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program penanggulangan kemiskinan, salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Konsep dan teori pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) merujuk pada kerangka kerja global yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Berikut adalah pengertian lebih rinci mengenai konsep dan teori pembangunan berkelanjutan:

Pembangunan berkelanjutan mengacu pada upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa merusak kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Hal ini mencakup pemerataan pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial. Konsep ini menekankan pentingnya integrasi antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam proses pembangunan.

PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui akses pendidikan, kesehatan, dan bantuan kesejahteraan sosial bagi keluarga miskin. Program ini memberikan bantuan tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan syarat-syarat tertentu, seperti pemenuhan kriteria pendidikan dan kesehatan. Tujuan utama PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan, memutus rantai kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang terdampak kemiskinan.

Selain itu, PKH juga memiliki keterkaitan yang erat dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang merupakan agenda pembangunan global yang ditetapkan oleh PBB. SDGs adalah serangkaian 17 tujuan pembangunan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk dicapai secara global hingga tahun 2030. Tujuan-tujuan ini mencakup berbagai aspek pembangunan berkelanjutan, termasuk pengentasan kemiskinan, kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, keberlanjutan lingkungan, dan perdamaian dan keadilan.

SDGs menetapkan berbagai target pembangunan berkelanjutan yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Melalui implementasi PKH, pemerintah Indonesia berusaha untuk mendukung pencapaian target-target SDGs terkait dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, PKH bukan hanya merupakan program perlindungan sosial bagi keluarga miskin, tetapi juga merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang tercantum dalam SDGs. Melalui upaya ini, diharapkan dapat terjadi perbaikan signifikan dalam kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang berdampak pada pencapaian target-target SDGs yang telah ditetapkan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dari Konsep dan Teori Pembangunan Berkelanjutan?
2. Apa saja prinsip dan tujuan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs)?
3. Apsaja bentuk tantangan dan peluang dari penerapan SDGs?
4. Bagaimana bentuk implementasi Teori Pembangunan Berkelanjutan dalam suatu contoh kasus dan kaitannya dengan SDGs?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui bagaimana Konsep dan Teori Pembangunan Berkelanjutan.
2. Untuk mengetahui prinsip dan tujuan dalam konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs).
3. Untuk memaparkan bentuk tantangan serta peluang yang muncul dari penerapan SDGs.
4. Untuk melihat bagaimana pengimplementasian Teori Pembangunan Berkelanjutan dalam suatu contoh kasus serta keterkaitannya dengan SDGs.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Konsep dan Teori Pembangunan Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan yang diketujui oleh Perdana Menteri Norwegia Gro Harlem Brundtland pada tahun 1987 sebagai pembangunan untuk masa kini yang tidak memerlukan kompromi generasi yang akan datang muncul pada pertemuan bangsa-bangsa di Norwegia. Pembangunan berkelanjutan diakui sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa merugikan hak pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Menurut Emil Salim (1990), pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pada dasarnya, pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk mencapai kesetaraan dalam pembangunan antar generasi baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Prinsip dasar dari konsep pembangunan berkelanjutan adalah memastikan bahwa pembangunan saat ini tidak mengorbankan kesejahteraan sosial generasi mendatang dengan memaksa mereka menerima standar kesejahteraan yang lebih rendah daripada generasi saat ini. Kesejahteraan sosial dalam konteks ini mencakup aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk memastikan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan ekologi. Dengan implementasi pembangunan berkelanjutan, negara dapat mencapai tujuan pembangunan masyarakat, yaitu meningkatkan taraf hidup yang pada akhirnya akan menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat (Ramadhani dan Prihantoro, 2020).

Berikut merupakan beberapa teori utama tentang pembangunan berkelanjutan:

1. Teori *Brundtland* (1987)

Teori ini, yang dikenal melalui Laporan Brundtland, mengartikan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Teori ini menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara tiga aspek pembangunan berkelanjutan yaitu, ekonomi, sosial, dan lingkungan.

2. Teori Kapasitas Membawa (*Carrying Capacity*)

Teori ini menjelaskan bahwa planet bumi memiliki kapasitas terbatas untuk mendukung kehidupan manusia dan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan harus beroperasi dalam batas kemampuan ini untuk mencegah kerusakan lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam.

3. Teori Ekologi Manusia (*Human Ecology*)

Teori ini menganggap bahwa manusia dan lingkungannya membentuk suatu sistem yang saling terkait. Pembangunan berkelanjutan harus memperhitungkan interaksi ini dan berupaya mencapai keseimbangan antara kebutuhan manusia dan pelestarian lingkungan.

4. Teori Ekonomi Hijau (*Green Economy*)

Teori ini menekankan pada upaya untuk mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan dan lingkungan. Konsep ekonomi hijau bertujuan untuk menghasilkan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi tingkat kemiskinan, sambil juga menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi emisi gas rumah kaca.

5. Teori Keadilan Antargenerasi (*Intergenerational Equity*)

Teori ini menggarisbawahi pentingnya keadilan antargenerasi. Pembangunan berkelanjutan harus menjamin bahwa generasi mendatang memiliki akses yang setara dengan generasi saat ini terhadap sumber daya dan peluang.

6. Teori Pembangunan Manusia (*Human Development*)

Teori ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas hidup manusia sebagai fokus utama pembangunan. Pembangunan berkelanjutan harus memperbaiki standar hidup manusia dengan meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.

7. Teori Tata Kelola yang Baik (*Good Governance*)

Teori ini menggarisbawahi kepentingan tata kelola yang efektif dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. Tata kelola yang efektif harus memiliki sifat transparan, akuntabel, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

8. Teori Partisipasi Masyarakat (*Public Participation*)

Teori ini menyoroti signifikansi keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan berkelanjutan. Masyarakat harus terlibat dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan.

9. Teori Kearifan Lokal (*Local Wisdom*)

Teori ini menyoroti pentingnya memperhatikan kearifan lokal dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. Kearifan lokal bisa menjadi sumber pengetahuan dan solusi yang berharga untuk mengatasi berbagai masalah pembangunan.

10. Teori Teknologi Tepat Guna (*Appropriate Technology*)

Teori ini menggarisbawahi pentingnya penerapan teknologi yang sesuai dalam pembangunan berkelanjutan. Teknologi yang sesuai harus cocok dengan kebutuhan dan situasi lokal, mendukung lingkungan, dan berkelanjutan.

Teori-teori ini saling berkaitan dan menyediakan kerangka kerja untuk memahami serta mencapai pembangunan berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di lapangan membutuhkan gabungan berbagai teori dan pendekatan yang disesuaikan dengan situasi lokal.

2.2 Prinsip dan Tujuan SDGs

A. Prinsip SDGs

Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) telah dirumuskan pada tingkat global dengan melibatkan para pemimpin 193 negara anggota PBB pada akhir September 2015. Agenda tersebut mengakui bahwa penghapusan kemiskinan dalam segala bentuknya, termasuk kemiskinan ekstrim, sebagai tantangan utama di tingkat global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan sebagai rencana aksi global dilaksanakan hingga tahun 2030 memiliki 5 prinsip-prinsip mendasar yang menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, diantaranya yaitu:

- 1) Manusia (*People*), Seluruh aspek kehidupan manusia merupakan hal yang penting sehingga pemenuhan kebutuhan dasar, seperti makanan, kesehatan, kehidupan layak, pendidikan, hingga kesetaraan gender harus dapat diwujudkan. Prinsip *people* ini mencakup target SDGs nomor 1 sampai 5.
- 2) Bumi (*Planet*), prinsip ini berkaitan dengan dibutuhkannya kerja sama komunitas internasional dalam melindungi bumi dari kerusakan. Upaya ini dapat dilakukan dengan manajemen air, pola produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab, kebijakan perlindungan lingkungan, dan proteksi ekosistem. Hal ini mencakup target SDGs nomor 6, 12 sampai 15.

- 3) Kemakmuran (*Prosperity*), Kemakmuran dapat diwujudkan dengan pembangunan ekonomi namun dalam mewujudkannya diharapkan dapat melibatkan seluruh aktor dan menjunjung keadilan. Sehingga semua manusia dapat hidup dan menikmati kemakmuran, baik secara ekonomi, sosial, maupun teknologi yang juga selaras dengan alam. Prinsip ini mencakup target SDGs nomor 7 sampai 11.
- 4) Perdamaian (*Peace*), Masyarakat yang inklusif, bebas dari rasa takut dan kekerasan menjadi harapan pada prinsip kedamaian. Upaya memperkuat institusi dapat meminimalkan ancaman seperti terorisme dan konflik, meskipun melalui cara non militeristik. Prinsip ini mencakup target SDGs nomor 16.
- 5) Kerjasama (*Partnership*), Kerja sama dari seluruh aktor, seperti pemerintah, sektor privat, dan masyarakat secara global menjadi cara untuk mencapai seluruh target SDGs pada tahun 2030, sesuai dengan target nomor 17.

Kelima prinsip dasar ini dikenal dengan istilah 5 P dan menaungi 17 Tujuan dan 169 sasaran yang tidak dapat dipisahkan, saling terhubung, dan terintegrasi satu sama lain guna mencapai kehidupan manusia yang lebih baik.

Adapun dalam tahapan/pelaksanaannya, TPB/SDGs secara umum berpegang pada prinsip universal, terintegrasi, inklusif dan *no one left behind*. Prinsip *universality*, yaitu mendorong penerapan TPB/SDGs di seluruh wilayah Indonesia. Prinsip *integration*, yang mengandung makna terintegrasinya dan saling keterkaitan antara dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Prinsip ketiga adalah “*No One Left Behind*” atau “Tidak ada seorangpun yang Tertinggal” yang menjamin bahwa pelaksanaan TPB/SDGs harus melibatkan semua pemangku kepentingan dan memberi manfaat bagi semua. Penerapan prinsip-prinsip tersebut memastikan TPB/SDGs dilaksanakan secara inklusif melalui gerakan bersama pemerintah dan pemangku kepentingan non pemerintah, antara lain ormas, filantropi, pelaku usaha, dan akademisi.

B. Tujuan SDGS

SDGs dirancang sebagai kelanjutan dari *Millenium Development Goals* (MDGs) yang belum tercapai tujuannya sampai pada akhir tahun 2015. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah serangkaian sasaran yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk dicapai secara global hingga tahun 2030 yang berfokus pada kesejahteraan, kualitas kehidupan, dan peningkatan kesejahteraan. SDGs mencakup 17 tujuan spesifik, yang masing-masing memiliki serangkaian target yang dapat diukur. Target-target ini dirancang untuk memberikan kerangka kerja yang jelas dan konkret untuk negara-negara, komunitas, dan individu untuk berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan. 17 tujuan SDGS meliputi: (1) menghapus kemiskinan (2) mengakhiri kelaparan (3) kehidupan sehat dan Sejahtera (4) Pendidikan berkualitas (5) Kesetaraan Gender (6) air bersih dan sanitasi layak (7) energi bersih dan terjangkau (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (9) industri, inovasi, infrastruktur (10) mengurangi ketimpangan (11) kota dan permukiman berkelanjutan (12) konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (13) penanganan perubahan iklim (14) menjaga ekosistem laut (15) menjaga ekosistem darat (16) perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat (17) kemitraan untuk mencapai tujuan. Untuk memudahkan pelaksanaan, 17 Tujuan TPB dikelompokkan ke dalam empat pilar, yaitu:

- 1) Pilar pembangunan sosial meliputi Tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5;
- 2) Pilar pembangunan ekonomi meliputi Tujuan 7, 8, 9, 10, dan 17;
- 3) Pilar pembangunan lingkungan, meliputi Tujuan 6, 11, 12, 13, 14, dan 15;

4) Pilar pembangunan hukum dan tata kelola meliputi Tujuan 16.

SDGs juga menekankan pentingnya kerjasama antar negara dan antar sektor. Ini mencerminkan pemahaman bahwa pembangunan yang berkelanjutan tidak dapat dicapai oleh satu negara atau sektor saja. Kerjasama antar negara dan antar sektor diperlukan untuk mencapai tujuan ini, termasuk melalui partisipasi dalam forum internasional, kerjasama dalam pengembangan teknologi, dan pembagian sumber daya dan pengetahuan. Dengan mengadopsi SDGs, masyarakat internasional berkomitmen untuk bekerja sama dalam mewujudkan visi pembangunan yang berkelanjutan, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk hidup dengan layak. Pada akhirnya, tujuan SDGs adalah untuk membangun sebuah dunia yang lebih kesejahteraan, lebih adil, dan lebih berkeadilan untuk semua penduduk, baik di negara berkembang maupun di negara maju.

2.3 Tantangan dan Peluang Penerapan SDGs di Indonesia

SDGs merupakan konsep pembangunan yang bersifat universal dan inklusif dalam rangka mewujudkan perubahan besar untuk menghilangkan kemiskinan, kelaparan, hingga kesenjangan social. Konsep ini dianggap sesuai untuk diterapkan oleh setiap negara, tidak hanya negara berkembang tetapi juga di negara maju. Tujuan pembangunan yang bersifat ambisius ini tentunya memiliki tantangan dan peluang yang besar dalam pengimplementasiannya, tidak terkecuali di Indonesia. Berikut beberapa tantangan dan peluang penerapan SDGs di Indonesia (Amirya, M: 2023).

1. Penyelarasan SDGs Dengan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Daerah

Dalam mengimplementasikan konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang diusung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia berupaya menyesuaikan isi SDGs global dengan peraturan nasional dan regional. Hal ini penting mengingat perbedaan kondisi global dan konteks pemerintahan Indonesia. Pemerintah Indonesia harus melakukan pemetaan terhadap indikator SDGs global dan indikator yang tertuang dalam peraturan nasional dan daerah yang berlaku. Proses ini memungkinkan pemerintah menilai kesesuaian peraturan yang ada dengan poin-poin SDGs. Apabila terdapat kejanggalaan maka dilakukan evaluasi lebih lanjut yang dapat berujung pada revisi atau pembuatan peraturan baru yang lebih sejalan dengan SDGs. Langkah-langkah ini bukanlah tugas yang mudah, Indonesia harus berhati-hati dalam membandingkan agenda dan target global dengan kondisi nasional yang unik. Penyelarasan yang dilakukan harus mengedepankan kondisi, permasalahan yang dihadapi dan tujuan nasional Indonesia. Dengan demikian, keselarasan antara SDGs dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah di Indonesia merupakan upaya berkelanjutan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan inklusif sesuai dengan konteks lokal.

2. Koordinasi Vertical Dan Horizontal Antar Lembaga Pemerintah

Peningkatan koordinasi vertikal dan horizontal dalam konteks implementasi SDGs merupakan langkah penting dalam memastikan efektivitas dan efisiensi upaya menuju terlaksananya tujuan SDGs. Sebelum konsep SDGs diadopsi dalam pemerintahan Indonesia, setiap lembaga pemerintah bertanggung jawab pada sektor-sektor tertentu sesuai dengan konstitusi dasar negara. Namun dengan hadirnya SDGs, peran lembaga-lembaga tersebut harus disesuaikan kembali untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Meskipun penguatan peran masing-masing lembaga penting, namun hal tersebut tidak akan cukup untuk menyelesaikan permasalahan yang

kompleks. Terkadang, upaya penyelesaian permasalahan di suatu bidang dapat menimbulkan permasalahan baru di bidang lain. Hal ini menekankan perlunya koordinasi antar lembaga pemerintah yang membawahi berbagai sektor kehidupan. Lembaga pemerintah dapat diibaratkan sebagai anggota suatu badan yang saling berhubungan satu sama lain. Untuk mencapai koordinasi yang baik, pemerintah harus mempertimbangkan mekanisme konsultasi nasional atau bentuk kerja sama antar lembaga lainnya. Koordinasi tidak hanya diperlukan secara vertikal antar lembaga, namun juga secara horizontal sesuai dengan struktur pemerintahan yang ada. Dengan meningkatnya koordinasi vertikal dan horizontal, institusi pemerintah dapat bekerja sama untuk mencapai SDGs dan mengatasi permasalahan kompleks yang dihadapi masyarakat.

3. Peningkatan Partisipasi Stakeholder

Dalam implementasi konsep SDGs, salah satu tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan partisipasi aktif seluruh stakeholder yang terlibat. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan mekanisme kelembagaan yang kuat yang didukung oleh keterlibatan seluruh aktor, tidak hanya dari lembaga pemerintah, tetapi juga dari LSM, lembaga swasta, akademisi, LSM internasional, mitra pembangunan dan masyarakat umum. Masing-masing aktor mempunyai peran penting dalam implementasi SDGs di Indonesia. Aktor pemerintah bertanggung jawab untuk merencanakan dan membuat peraturan terkait SDGs. Namun partisipasi aktif dari aktor lain seperti LSM, lembaga swasta dan masyarakat sangat diperlukan sebagai pendukung, pelaksana, dan pengawas implementasi peraturan terkait SDGs. Mereka berperan untuk memastikan regulasi yang dibentuk dapat memenuhi tujuan SDGs atau tidak. Sebagian besar negara berkembang belum mampu mewujudkan partisipasi aktif dari seluruh stakeholder untuk menjalankan konsep SDGs, termasuk Indonesia. Sehingga Indonesia harus meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya SDGs di antara seluruh stakeholder untuk memastikan pencapaian tujuan SDGs bersama.

Selain tantangan, terdapat pula peluang besar dalam penerapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia. Mengingat akan hadirnya bonus demografi diantara tahun-tahun 2018-2043 akan membuka kesempatan besar dalam peningkatan kualitas pembangunan di Indonesia (Salim E, 2010). Bonus demografi sendiri akan menjadi peluang besar apabila kualitas dan produktifitas sumber daya angkatan ini mampu ditingkatkan. Pemerintah Indonesia sendiri telah berupaya meningkatkan kualitas SDM melalui jalur Pendidikan salah satunya dengan cara menerapkan kurikulum Merdeka Belajar di setiap jenjang pendidikan.

Selain dalam konteks SDM, SDGs sendiri mencakup berbagai aspek pembangunan lainnya, termasuk pengelolaan energi. Di Indonesia, terdapat banyak potensi untuk menerapkan konsep-konsep ini. Perusahaan energi Indonesia dapat memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah untuk menerapkan manajemen energi berkelanjutan (Fitriandari, M., & Winata, H, 2021). Salah satu langkah konkret yang telah diambil adalah penggunaan energi terbarukan, seperti solar dan biodiesel. Kebijakan pemerintah, seperti penggantian produk solar dengan B20 (biodiesel 20%), menunjukkan komitmen untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan beralih ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Penggunaan B20 juga dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan memperkuat ketahanan pangan, karena dapat memberikan tambahan nilai pada industri perkebunan kelapa sawit. Melalui kebijakan seperti Perpres Nomor 66 Tahun 2018 dan Permen No. 41 Tahun 2018, pemerintah telah mengatur tentang penggunaan biodiesel dan pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit untuk mendukung penggunaan bahan bakar nabati dalam industri energi. Dengan demikian, penerapan konsep

pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan energi tidak hanya akan membantu mencapai target SDGs terkait dengan energi bersih, tetapi juga akan berkontribusi pada ketahanan pangan dan pengurangan kemiskinan melalui pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

2.4 Implementasi SDGs di Indonesia

- Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang dihadapi oleh banyak negara di dunia. Meskipun tingkat dan jumlah kemiskinan di tiap negara berbeda-beda tidak dapat dipungkiri bahwa tidak ada negara yang tidak pernah menghadapi masalah kemiskinan ini. Kemiskinan merupakan suatu ancaman yang serius bagi sebuah negara meskipun saat ini teknologi dan industri terus berkembang. Di Indonesia pemerintah telah meluncurkan berbagai program penanggulangan kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan syarat-syarat tertentu di bidang pendidikan dan kesehatan.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui akses pendidikan, kesehatan, dan bantuan kesejahteraan sosial bagi keluarga miskin. PKH memberikan bantuan tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan kriteria seperti anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun, serta memberikan bantuan kesehatan kepada ibu hamil/nifas dan anak usia 0-6 tahun. Program ini juga bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, memutus rantai kemiskinan, meningkatkan sumber daya manusia, dan merubah perilaku keluarga miskin yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. PKH juga mendukung pencapaian target Program *Milenium Development Goals* (MDGs) seperti penanggulangan kemiskinan, pemberian pendidikan dasar, pengurangan angka kematian ibu melahirkan, serta pengurangan kematian bayi dan balita. PKH juga melibatkan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Sebagai imbalannya, Keluarga Penerima Manfaat diwajibkan untuk memenuhi persyaratan terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam bidang pendidikan dan Kesehatan.

- Keterkaitan Dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki keterkaitan yang erat dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh PBB. Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) berupa kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan dalam memperbaiki kualitas hidup serta membantu dalam mengurangi pengeluaran keluarga miskin desa. Tujuan tersebut juga secara tidak langsung menyokong pencapaian target dari Program *Milenium Development Goals* (MDGs) yang juga dilaksanakan oleh Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu penanggulangan kemiskinan dan kelaparan, memberikan pendidikan dasar, pengurangan angka kematian ibu melahirkan, dan pengurangan kematian bayi dan balita.

Melalui program PKH, pemerintah Indonesia berupaya untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdampak kemiskinan.

Dengan memberikan bantuan tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan mendorong pemenuhan persyaratan di bidang pendidikan dan kesehatan, PKH berkontribusi dalam mencapai target-target SDGs terkait dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat .

Dengan demikian, PKH tidak hanya merupakan program perlindungan sosial bagi keluarga miskin, tetapi juga merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang tercantum dalam SDGs. Melalui implementasi PKH, diharapkan dapat terjadi perbaikan signifikan dalam kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang berdampak pada pencapaian target-target SDGs yang telah ditetapkan.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Konsep pembangunan berkelanjutan muncul pada pertemuan bangsa-bangsa di Norwegia pada tahun 1987 yang dipimpin oleh Perdana Menteri Norwegia Gro Harlem Brundtland. Pembangunan berkelanjutan disepakati sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan-kebutuhan generasi yang akan datang. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, dibutuhkan pembangunan hukum yang berkelanjutan. Terdapat beberapa teori utama tentang pembangunan berkelanjutan, di antaranya teori Brundtland, teori kapasitas membawa, teori ekologi manusia, teori ekonomi hijau, teori keadilan antargenerasi, teori pembangunan manusia, teori tata kelola yang baik, teori partisipasi masyarakat, teori kearifan lokal, dan teori teknologi tepat guna. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah serangkaian sasaran yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk dicapai secara global hingga tahun 2030 yang berfokus pada kesejahteraan, kualitas kehidupan, dan peningkatan kesejahteraan. SDGs mencakup 17 tujuan spesifik, yang masing-masing memiliki serangkaian target yang dapat diukur. Implementasi SDGs di Indonesia memiliki tantangan dan peluang, di antaranya penyelarasan SDGs dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, koordinasi vertikal dan horizontal antar lembaga pemerintah, dan peningkatan partisipasi stakeholder. Salah satu implementasi SDGs di Indonesia adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) berupa kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan dalam memperbaiki kualitas hidup serta membantu dalam mengurangi pengeluaran keluarga miskin desa. PKH memiliki keterkaitan yang erat dengan SDGs dan bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdampak kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, O. S. (2016). *Pembangunan berkelanjutan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Amirya, M. (2023). Tantangan Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 9(1).
- Chotim, E. E. (2020). Pembangunan Berkelanjutan dengan Dimensi Ekonomi, Ekologi, dan Sosial di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 4(1), 462-481.
- Darmiyanti, R. (2022). Implementasi Program keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020. *Jurnal Dinamika Pemerintahan 1* (1), 108-122.
- Fitriandari, M., & Winata, H.(2021). Manajemen pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Competence: Journal of Management Studies*, 15(1), 1-13.
- Ishatono, S. T. (2016). *Sustainable Development Goals (SDGs) dan pengentasan kemiskinan.. Social Work Journal 6* (2), 159-165.
- Jateng, P. (2019). Rencana Aksi Daerah: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). *Sustainable Development Goals (SDGs) Provinsi Jawa Tengah Tahun,2023*, 1-337.
- Khodziah Isnaini Kholif, I. N. (2014). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Administrasi Publik 2* (4), 709-714.
- Lubis, M. S. (2021). *PERENCANAAN WILAYAH UNTUK MENDUKUNG KONSEP BERKESINAMBUNGAN "SUSTAINABILITY DEVELOPMENT"*. Sumatera Utara: Bircu Publishing.
- Pertiwi, N. (2017). *Implementasi Sustainable Development di Indonesia*. Makassar: Pustaka Ramadhan.
- Rivai, R. S., & Anugrah, I. S. (2011). Konsep dan implementasi pembangunan pertanian berkelanjutan di Indonesia. *In Forum Penelitian Agro Ekonomi (Vol. 29, No. 1, pp. 13-25)*.
- Salim, E. (2010). *Pembangunan berkelanjutan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Suparmoko, M. (2020). Konsep pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan nasional dan regional. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, 9(1), 39-50.
- Sasmito, C. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam upaya Mengentaskan Kemiskinan di kota Batu.. *Journal of Public sector innovation 3* (2), 68-74
- Zulyanto, A. (2022). Pendidikan Dan Pengentasan Kemiskinan Dalam Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). *Convergence: The Journal of Economic Development*, 4(1), 32-4